

DETERMINAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA

TIMUR PERIODE 2013-2023



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA EKONOMI**

Oleh:

Marivatul Qibtivah

21108010126

Dosen Pembimbing:

Riswanti Budi Sekaringsih, M. Sc

19851009 201801 2 001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1284/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR
PERIODE 2013-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIYATUL QIBTIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21108010126
Telah diujikan pada : Senin, 14 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Riswanti Budi Sekaringsih, M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 60662860617



Penguji I

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 6868241c4368b



Penguji II

Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
SIGNED

Valid ID: 68963cc2348f



Yogyakarta, 14 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Andriansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 68a5764b1540

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mariyatul Qibtiyah

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mariyatul Qibtiyah

NIM : 21108010126

Judul Skripsi : Determinan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2023

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Pembimbing,



Riswanti Budi Sekaringsih, M. Sc
NIP. 19851009 201801 2 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariyatul Qibtiyah
NIM : 21108010126
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Determinan Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2023” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung Jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 20 Juni 2025
Penyusun



Mariyatul Qibtiyah
NIM. 21108010126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariyatul Qibtiyah
NIM : 21108010126
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Determinan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Periode 2013-2023”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penyusun/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2025
Penyusun,


Mariyatul Qibtiyah
NIM. 21108010126

MOTTO

Menjadi tenang bukanlah tentang selalu berada di titik tertinggi, namun bagaimana hati ini mengalir dengan ikhlas pada setiap alur yang Tuhan tetapkan.

~ Menjadi Indah Setelah Patah



PERSEMBAHAN

For my parents...

Who have made everything possible



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua ta' marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya''</i>

D. Vocal Pendel dan Penerapannya

--- ُ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathh	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya'' mati	Ditulis	A
تأسي	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya'' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الْأَشْمَسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



ABSTRAK

Adanya desentralisasi fiskal sebagai mekanisme optimal dalam alokasi sumber daya menjadikan pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang efektif dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yakni dengan menyediakan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi yang mana penyediaan sarana dan prasarana tersebut di distribusikan melalui alokasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya terhadap Belanja Modal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode 2013-2023 dengan total observasi 418. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan variabel PAD, DAU dan SiLPA secara bersama-sama memberikan pengaruh pada alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2023.

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

ABSTRACT

The existence of fiscal decentralization as an optimal mechanism for resource allocation gives local governments the freedom to make decisions in accordance with the needs of the local community, especially in terms of financial management and public services. Effective financial management and decision-making can have an impact on the welfare of local communities. The government's efforts to improve the welfare of its people include providing adequate infrastructure and facilities to support the smooth running of economic activities, with the provision of these facilities and infrastructure distributed through capital expenditure allocations budgeted in the APBD. This study aims to identify the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Previous Year Budget Surplus (SiLPA) on Capital Expenditure. The data used are secondary data obtained from the APBD realization reports of districts/cities in East Java for the period 2013-2023, with a total of 418 observations. The analytical method used in this study is panel data regression analysis. The results of the study indicate that, partially, PAD, DAU, and SiLPA have a positive influence on capital expenditure. Meanwhile, simultaneously, the variables PAD, DAU, and SiLPA collectively influence the allocation of capital expenditure in districts/cities in East Java Province from 2013 to 2023.

Keywords: Capital Expenditure, Local Revenue, General Allocation Fund, Budget Calculations Surplus Time

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya bagi Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Determinan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur Periode 2013-2023” dengan baik. penyusunan skripsi ini selain dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan juga untuk membantu peneliti lain sebagai sumber referensi.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, penyusun mengalami banyak kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras ditambah dengan bantuan, bimbingan, kerjasama, do'a dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., AK., CA., ACPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Riswanti Budi Sekaringsi, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan, arahan dan juga semangat selama penyusunan skripsi mulai dari dimana pelaksanaan Colloquium sampai dengan penyusun menyelesaikan skripsi ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, penyusun berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan ibu.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun selama mengenyam Pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kekasihku, Bapak Rachmat tercinta, satu-satunya laki-laki yang dengan sangat gagah mengusahakan gadis kecil ini untuk mendapatkan gelar di

akhir nama yang dipiuhnya. Terimakasih karena selalu mengusahakan dan memastikan gadis kecil mu baik-baik saja saat jauh dari rumah.

7. Seseorang yang tidak bisa tergantikan kasihnya, Ibu Thoifah tersayang, dorongan doa yang tidak pernah berhenti, terimakasih telah merayu tuhan untuk membuat jalan gadis kecil ini dimudahkan dan dilancarkan pada setiap keputusan yang diambil.
8. Mas Nashir, Mbak Lia, Mas Shafif, Mbak Aini, Adek Khuluq, Adek Bella, keluarga yang sangat hangat dimana keluh kesah selalu dibalas dengan pelukan. Terimakasih karena selalu memberi dukungan, kekuatan, nasehat dan cinta kepada penyusun.
9. Ai'datus Safitri. Sepupu sekaligus sahabat yang sedari kecil menjadi pendengar setia bagaimana senang sedihnya penyusun. Terimakasih sudah terus kebersamai dan saling menyemangati pada kondisi yang buruk.
10. Ellina Nur Dinnasikha. Patner sekamar juga patner berproses memperoleh gelar S.E., terimakasih sudah banyak membantu penyusun selama 4 tahun dibangku perkuliahan.
11. M. Hafidz Adi Riswanda Putra, sepupu juga sekaligus sahabat, Terimakasih sudah berkenan untuk diajak riwa riwi saat dunia terasa penat. Terimakasih juga sudah memperkenalkan betapa tenang dan indahnya pemandangan diatas ketinggian.
12. Sahabatku, Fatkhiyatur Rahmawati H. dan Nailatun Nufus. Terimakasih karena selalu mendukung dan menyemangati penyusun untuk menyelesaikan perjuangan ini sampai akhir.
13. Ikfyna Himmah A., Shofinaa Ngilman N., Shofia Chafi A., Nabila Sinta R., Mahda Auniza. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah penyusun selama empat tahun di Yogyakarta.
14. Keluarga Inti KKN 307 dan teman-teman Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bahagia, bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

Penyusun berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan

tugas akhir. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi penyusun. Akhir kata karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemajuan serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Mariyatul Qibtiyah
21108010126



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Pokok Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	16
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori	16
1. Fiscal Federalism Theory	16
B. Telaah Pustaka	27
C. Pengembangan Hipotesis	39

D.	Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III		44
METODE PENELITIAN		44
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Definisi Operasional Variabel	44
1.	Variabel Independen	44
2.	Variabel Dependen	47
C.	Populasi dan Sampel	48
D.	Data dan Sumber Data	48
E.	Metode Analisis.....	49
1.	Regresi Data Panel	49
2.	Asumsi Klasik	50
3.	Uji Pemilihan Model	53
4.	Estimasi Parameter Model Data Panel	54
BAB IV		62
HASIL DAN PEMBAHASAN		62
A.	Gambaran Umum Objek penelitian	62
B.	Analisis Deskriptif	65
C.	Analisis Hasil Uji.....	68
D.	Pembahasan Penelitian.....	79
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.....	79
2.	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal	82
3.	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya terhadap Belanja Modal	85
BAB V		88
PENUTUP		88
A.	Kesimpulan	88

B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2023	3
Gambar 1.2	Realisasi jenis Belanja Daerah di Jawa Timur Periode 2013- 2023	5
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	45
Gambar 4.1	Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2023	65
Gambar 4.2	Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2023	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian literatur pengaruh DAU, DAK, DBH dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	30
Tabel 3.1 Kualifikasi Uji pemilihan mode.....	56
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4.3 Uji Hausman atau Hausman-Test	69
Tabel 4.4 Hasil Model Regresi Data Panel.....	71
Tabel 4.5 Hasil Model Regresi Fixed Effect Model (FEM) dengan Menggunakan Cross-Section Wight.....	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Auto Korelasi	78
Tabel 4.9 Hasil Uji t Statistik (Parsial).....	79
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan)	80
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

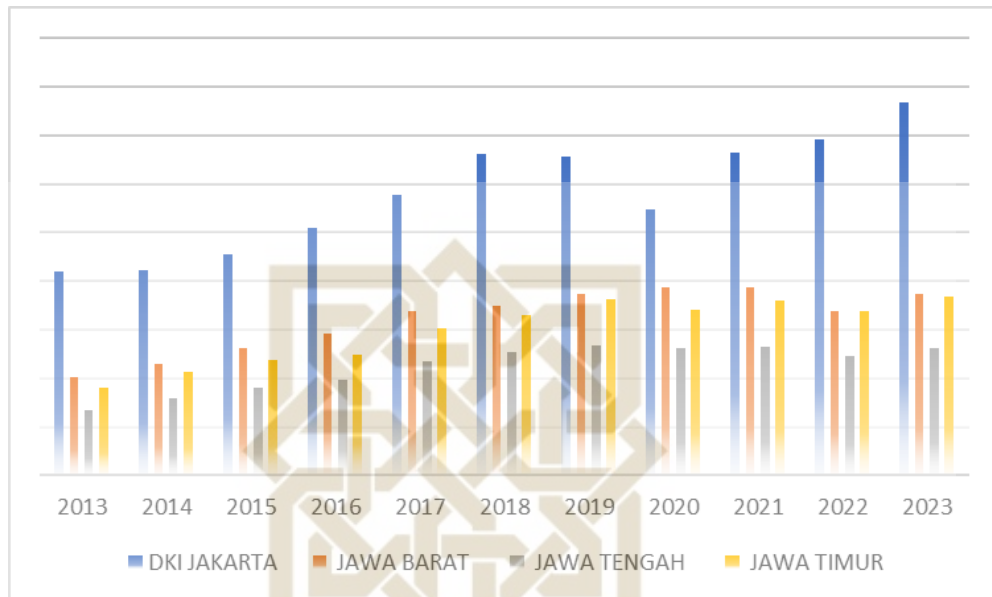
A. Latar Belakang

Perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengelolaan keuangan regional yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 kemudian di revisi lagi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya tersentralisasi menjadi daerah otonom, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri terkait kepentingan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui upaya menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Adanya otonomi daerah menjadikan keuangan daerah sebagai indikator untuk menilai seberapa mampu suatu daerah dalam mengatur rumah tangganya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Malisan & Fakhroni, 2017).

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Jika angka pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat (Lestari & Basuki, 2024). Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal yakni dengan cara menyediakan infrastruktur serta sarana dan

prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur tersebut didistribusikan melalui alokasi belanja modal yang dirancang setiap periode dalam APBD (Nasution et al., 2023). APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang dirancang, dipertimbangkan, dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lalu disahkan melalui perundang-undangan daerah (Maryati et al., 2022). APBD memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan dan pengalokasian APBD yang tepat akan mendukung penyediaan pelayanan publik berkualitas, pengembangan infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan sosial. Melalui APBD, masyarakat dapat memperoleh gambaran secara transparan mengenai penggunaan dan alokasi sumber daya daerah. Sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD berfungsi sebagai arahan untuk pemda guna menyajikan pelayanan kepada masyarakat selama satu periode anggaran.

Gambar 1.1 Grafik Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2013-2023



Sumber: Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah 2025

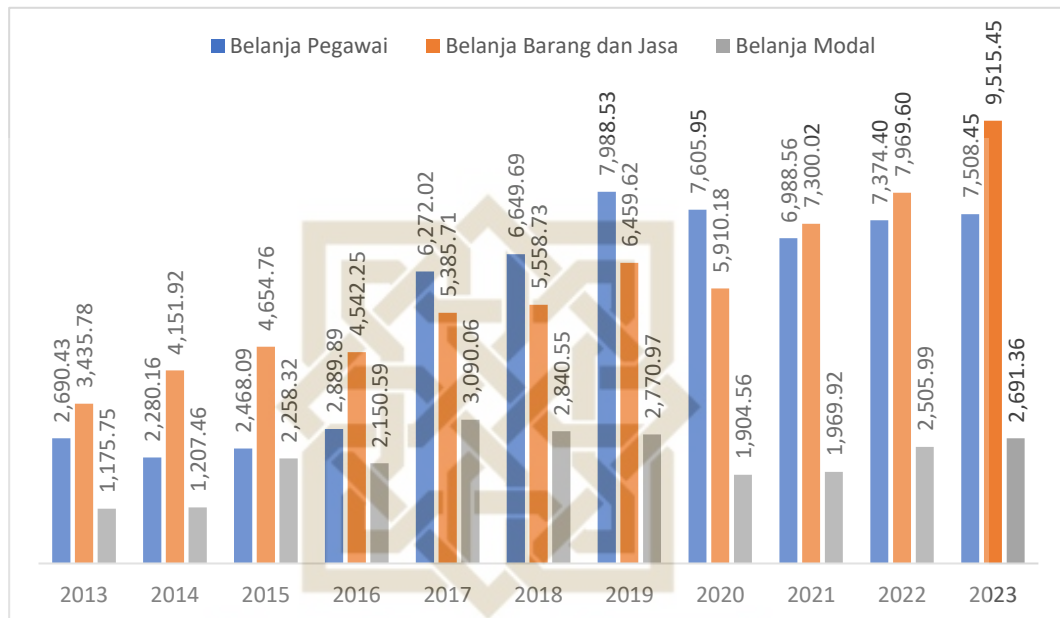
Grafik yang ditampilkan diatas menunjukkan APBD Provinsi Jawa timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta dari tahun 2013 – 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 APBD setiap provinsi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan nasional pada tahun tersebut, seperti terjadinya pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada pendapatan daerah. Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi APBD kembali mengalami peningkatan. DKI Jakarta memiliki nilai APBD tertinggi secara signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki nilai APBD yang relatif berdekatan, sedangkan Jawa Tengah memiliki nilai APBD paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya

namun tren APBD Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama periode 2013-2023.

APBD mencakup tiga komponen utama, yaitu penerimaan daerah, pembiayaan daerah, dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dalam satu periode anggaran. Selain itu, pembiayaan daerah mencakup semua kegiatan keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Akhirnya, pengeluaran daerah mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna mendanai pelaksanaan administrasi dan pembangunan daerah.

Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan regional dan penyediaan layanan publik. Belanja modal ialah komponen utama dari pembelanjaan daerah, dikarenakan belanja modal berkaitan erat dengan penyediaan layanan publik dan pengembangan infrastruktur (Twinki & Widiyanti, 2023). Anggaran untuk belanja modal umumnya dimanfaatkan untuk investasi pada aset jangka panjang yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas masyarakat lainnya. Selain itu, belanja modal juga dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui investasi jangka panjang yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 1.2 Grafik realisasi jenis Belanja Daerah di Jawa Timur
Periode 2013- 2023**



Sumber: Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah 2025

Melalui grafik pada gambar 1.2 dapat diamati sepanjang periode 2013-2023 belanja daerah Sebagian besar didominasi oleh pengeluaran untuk barang dan jasa serta pengeluaran untuk pegawai. jika dibandingkan antara pengeluaran aktual untuk tenaga kerja, barang dan jasa, serta pengeluaran modal, pengeluaran modal memiliki nilai terendah yang mengindikasikan bahwa alokasi belanja daerah masih kurang produktif karena sebagian besar anggaran dialokasikan bukan pada belanja modal. Ketepatan pemerintah daerah dalam mendistribusikan anggaran belanja berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada belanja modal, hal ini disebabkan belanja modal merupakan instrument vital yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada evaluasi yang dilakukan oleh Komisi X DPR pada tahun 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat 289 daerah di Indonesia yang belum mengalokasikan APBD nya untuk belanja infrastruktur (DJPB, 2023). Lalu pada Rapat paripurna yang dilakukan di Surabaya, tanggal 05 Juni 2023 yang dikutip dari Antara Jatim (2023) gubernur Jawa Timur menyampaikan “Realisasi pendapatan daerah lebih besar dari yang ditargetkan, serta realisasi belanja dan transfer yang lebih kecil dari anggaran” maksudnya, pada tahun 2022 realisasi Pendapatan daerah mencapai Rp 31,9 triliun atau 107,92 persen dari jumlah yang ditargetkan. Namun realisasi belanja daerah untuk belanja modal Rp 2,5 triliun. Sedangkan Belanja Operasional Rp 20,88 Triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 116,40 miliar 16.40 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 709,19 miliar serta realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 7,99 triliun. Jika merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/desa. Lalu dalam hal presentase belanja pegawai setiap daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

Pertumbuhan dana alokasi belanja modal dipengaruhi oleh besarnya penerimaan yang diperoleh daerah. Meningkatnya sumber pendapatan suatu daerah, maka semakin besar pula fleksibilitas daerah untuk mengatur

kepentingan daerahnya. Sesuai dengan salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu kemampuan untuk menggali sumber keuangannya secara mandiri. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan, dimana hasil pengelolaan sumber daya tersebut akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi belanja pemerintah daerah (Fatimah et al., 2020).

Bagi institusi pemerintahan ditingkat lokal PAD merupakan pembiayaan yang penting karena PAD ialah penerimaan yang didapat pemerintah melalui pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah. PAD diupayakan bisa berfungsi sebagai salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam adanya desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan eksplorasi potensi pendapatan di daerahnya, sehingga tidak muncul masalah terkait pembiayaan selama pelaksanaannya. Komponen PAD diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk pendapatan pajak daerah, pungutan daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan jenis pendapatan PAD lainnya yang sah. Peningkatan pendapatan PAD diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik, memperbaiki finansial lokal, serta mengurangi dependensi dari dana transfer pusat.

Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat penerimaan non-APBD yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal.

Penerimaan yang dimaksud yakni berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menangani terjadinya ketidakseimbangan anggaran antar wilayah. Penerimaan yang diterima dari pemerintah pusat diistilahkan sebagai dana transfer pusat atau dana perimbangan. Dana perimbangan ialah alokasi anggaran dari APBN yang ditetapkan Pemerintah pusat guna pendanaan kepentingan regional selama proses desentralisasi. Dana perimbangan mencakup: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dialokasikan berdasarkan kontribusi daerah terhadap pendapatan negara, sedangkan DAU didistribusikan untuk menyeimbangkan kemampuan finansial antar wilayah. Sementara itu, DAK ditujukan untuk mendanai aktivitas khusus yang menjadi prioritas nasional. Ketiga jenis anggaran ini memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan belanja modal daerah. DBH dapat langsung dialokasikan pada belanja modal, sementara DAU, yang umumnya digunakan untuk belanja pegawai dan infrastruktur, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan anggaran belanja modal, terutama ketika kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah. Dengan demikian, pengelolaan dana perimbangan yang efektif dapat mendorong peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah, berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber pembiayaan alternatif yang dialokasikan untuk belanja modal dalam penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merujuk pada

selisih antara pendapatan aktual dan pengeluaran selama periode fiskal. Kebanyakan dari SiLPA dialokasikan untuk pengeluaran langsung dalam bentuk investasi modal yang secara langsung meningkatkan ketersediaan layanan publik bagi masyarakat. (Mentayani & Rusmanto, 2013). Menurut Afkarina & Hermanto (2017) merepresentasikan SiLPA sebagai dana internal pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk mendanai kegiatan rutin tahunan. SiLPA dapat mengindikasikan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Karena pembentukan SiLPA terjadi ketika terdapat surplus dalam APBD dan pembiayaan netto menunjukkan angka positif, di mana unsur-unsur pendapatan lebih tinggi daripada ekspenditur pembiayaan. Untuk itu, besarnya jumlah SiLPA seharusnya bisa menjadi tambahan pembiayaan untuk mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar terhadap alokasi belanja produktif seperti belanja modal.

Optimaslisasi kualitas pada sektor publik dapat mendorong minat investor untuk menginvestasikan modal di daerah. Sehingga, reorientasi proporsi belanja adalah bentuk langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah guna memperkuat kepercayaan publik melalui pengembangan investasi modal berupa aset tetap, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Pemerintah daerah diharapkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya, salah satunya dengan meningkatkan proporsi belanja modal yang dialokasikan untuk pengembangan sektor-sektor produktif di wilayahnya. (Kresnandra, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan merupakan tujuan utama pemerintah central dan regional. Sejalan dengan itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan turut menjadi prioritas. Pembangunan ekonomi yang berhasil ditandai dengan peningkatan produktivitas, pendapatan per kapita, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upayanya, pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber daya, termasuk melalui kolaborasi dengan publik untuk menciptakan peluang kerja baru (Sukmawati et al., 2021). Maka dari itu, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian daerah tersebut. Jika pemerintah daerah bisa mengatur APBD secara efektif dan efisien, maka akan terwujud peningkatan pembangunan daerah juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah daerah kurang mampu dan kurang efisien dalam mengelola APBD maka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat (Kresnandra, 2016).

Berdasarkan kajian oleh Nasution et al. (2023), Khulwani et al. (2022) dan Purnasari et al. (2022) membuktikan bahwa PAD, DAU dan SiLPA Tahun sebelumnya mempengaruhi besaran alokasi Belanja Modal. Di sisi lain, kajian oleh Gunawan Siregar (2022) dan Bahri et al. (2023) menyatakan bahawa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Sebagaimana uraian pendahuluan dan kajian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji

apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur dengan judul “**Determinan Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013-2023**”.

B. Batasan Pokok Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan dan hanya fokus untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan, sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam. Adapun batasan pokoknya antara lain:

1. Studi ini mengambil lokasi di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jawa Timur
2. Statistik yang dipakai pada studi ini mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan Belanja Modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.
3. Periode yang diambil yakni sebelas tahun, dimulai dari tahun 2013-2023.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada pendahuluan yang sudah diuraikan sebelumnya, terdapat empat isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur?

3. Apakah Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk isu utama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah berdampak dan Belanja modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur
2. Untuk memahami keterkaitan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur
3. Untuk memahami keterkaitan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan Belanja modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Studi ini memberikan manfaat kepada penulis dengan memperluas pengetahuan penulis terkait Pengaruh PAD, DAU, SiLPA Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2013-2023. Disamping itu penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di tingkat sarjana di Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah terkait dengan kebijakan fiskal, khususnya dalam realisasi Belanja Modal. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi akademisi atau mahasiswa yang ingin memahami tentang hubungan antara variabel PAD, DAU dan SiLPA dengan Belanja modal.

3. Manfaat Untuk Pemerintah dan Masyarakat

Kajian ini dapat memberi manfaat kepada pemerintah dan masyarakat khususnya pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber dana dari pemerintah pusat dengan lebih efektif, karena dengan efektifnya pengelolaan sumber dana dari pemerintah pusat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan infrastruktur, akses yang lebih baik ke layanan dasar juga pengurangan ketimpangan sosial serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini disusun sistematis dengan memuat lima bab, pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan menjelaskan alur berpikir daripada penulis. Berikut adalah elemen utama penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan terkait fenomena dan problematika utama terkait penelitian ini. Penulis secara khusus akan mengolaborasi problematika penelitian dengan sejumlah fakta dan data

yang kemudian diidentifikasi. Selanjutnya, pada bab ini dijelaskan terkait batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dibahas oleh penulis berdasarkan latar belakang yang nantinya akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan *literature* terdahulu dan melakukan *review* atas setiap literatur yang digunakan. Selain itu dijelaskan juga pendekatan teoritis secara sistematis lalu dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis pada tiap variabel penelitian yang akan dijawab pada bab akhir dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ke tiga ini penulis menjelaskan tentang jenis data, metode penelitian, teknik analisis dan teknik pengumpulan data. Dalam bab ini penulis juga menyebutkan definisi operasional variabel dan sumber data yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan, penulis menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang disebutkan dalam bab satu. Pada bagian ini penulis memaparkan hasil pengujian statistik yang berkaitan dengan penelitian ini dan menginterpretasikan hasil dari uji statistik yang dilakukan. Pada sub bab pembahasan akan dijelaskan secara detail mengenai hasil uji statistik sehingga pada bab ini akan dikolaborasi dengan penelitian terdahulu yang sejalan atau tidak dengan hasil dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya.

Selain itu, bab ini juga berisi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian dan pemaparan saran terhadap beberapa pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2013-2023 ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $0.0307 < 0.05$ yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur mampu mengelola keuangannya secara mandiri untuk memaksimalkan PAD. Nilai Pendapatan Asli Daerah paling kecil yaitu terdapat pada kota Batu periode 2013, sedangkan nilai PAD paling besar yaitu terdapat pada kota Surabaya periode 2023.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2013-2023 dengan nilai *p-value* sebesar $0.0000 < 0.05$ yang mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang menerima DAU yang besar juga memiliki alokasi belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait keuangan daerah yang mana penggunaan

Dana Alokasi Umum digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah melalui belanja modal. Nilai Dana Alokasi Umum paling kecil terdapat pada kabupaten Pasuruan periode 2014, sedangkan Dana Alokasi Umum paling besar terdapat pada Kabupaten Jember periode 2019.

3. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2013-2023 ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $0.0000 < 0.05$ yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan SiLPA berkontribusi pada peningkatan alokasi Belanja Modal. Tambahan pendapatan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya mengakibatkan pemerintah daerah memiliki kecukupan dana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui pengalokasian dana yang optimal untuk alokasi belanja modal. Nilai SiLPA paling kecil terdapat pada kota Blitar periode 2021, sedangkan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya paling besar terdapat pada kabupaten Bojonegoro periode 2023.
4. Berdasarkan hasil uji *f* (simultan) didapatkan *p-value* sebesar $0,000000 < 0,05$, artinya secara Bersama-sama variabel PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2013-2023. Sebesar 87% variabel independent mampu menjelaskan variabel Belanja Modal kabupaten/kota di Jawa Timur

periode 2013-2023. Sedangkan sebanyak 13% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model.

B. Saran

Berdasarkan studi yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang harus dipertimbangkan kembali oleh pihak yang terkait antara lain:

1. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait hal anggaran keuangan. Pemerintah daerah perlu senantiasa berupaya mewujudkan kemandirian tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal telah menunjukkan pengaruh yang sangat besar melalui bertambahnya PAD dalam pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah penting untuk memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah untuk menunjang PAD yang lebih besar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat tinggi sehingga menciptakan potensi dari PAD terhadap kesadaran membayar pajak. Permasalahan yang sering dialami pemerintah pada anggaran DAU belum dikelola secara maksimal. Lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai, perlu dilakukan perhitungan kembali porsi yang harus diberikan untuk membayar pegawai dan porsi untuk kebutuhan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
2. Untuk penelitian selanjutnya, bagi peneliti yang akan menggunakan topik yang sama mengenai keuangan daerah diharapkan untuk

menambah data tahun yang terbaru dan variabel yang lebih banyak.

Tujuannya untuk dapat menggali informasi yang lebih dalam dari faktor yang mempengaruhi porsi alokasi anggaran daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). *Pengaruh PAD, DAU, SILPA Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*.
- Agustin, D. T., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 416. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.548>
- Anasta, L., & Marsyaf. (2019). THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD), GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU), SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) AND AREA OF AREAS ON CAPITAL EXPENDITURE (Case Study in Regency / City on Java Island in 2016). *European Journal of Business and Management*, 11(16). <https://doi.org/10.7176/EJBM>
- Bahri, H., Akhyar, C., & Putri, H. (2023). *THE INFLUENCE OF REGIONAL GENUINE INCOME, BALANCED FUNDS AND BUDGET RETURN CALCULATIONS (SILPA) ON CAPITAL EXPENDITURES IN INDONESIAN PROVINCE* (Vol. 1, Issue 4). <https://jaruda.org>
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (1999). *Intergovernmental Relations: Issues in Public Policy*.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Gedeona, H. T. (2009). *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang*.
- Gunawan Siregar, I. (2022). PENGARUH DAU, DAK, PAD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL. In *Dynamic Management Journal ISSN* (Vol. 6, Issue 2). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj>
- Hadisantoso, E., Arifuddin, Wawo, A. B., & Ridwan, Muh. (2023). The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi District/ City. *Owner*, 7(4), 3712–3720. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1937>

- Jibir, A., & Aluthge, C. (2019). Modelling the determinants of government expenditure in Nigeria. *Cogent Economics and Finance*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1620154>
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation. In *Journal of Accounting Research* (Vol. 2, Issue 2). [www/http/jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE](http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE)
- Khulwani, I., Rinofah, R., & Sari, P. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016–2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1050–1068. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.776>
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal Of Management Review*, Vol 1 No 1, 13–23. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.509>
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi*. <https://doi.org/10.26905/jbm.v3i2.410>
- Latif, A., Mardiana, A., & Aisyah, S. (2022). The Effect of Original Regional Income and General Allocation Funds on Capital Expenditure of Central Sulawesi Province The Year 2015-2019 Media Trend. *MediaTrend*, 17(2), 2022–2578. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v17i1.15914>
- Lestari, R. I., & Basuki, P. (2024). The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of The NTB Provincial Government. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 07(01). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>
- Maharani, A. D., Romli, H., & Meiriasari, V. (2021). The Effect of Local Taxes, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures of the Government of South Sumatra. In *International Journal of Community Service & Engagement* (Vol. 2, Issue 3).
- Mahyu, A., & Andriyani, D. (2019). The Effect of Local Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds on

Regional Expenditures in Aceh Province. In *Journal of Maliksussaleh Public Economics* (Vol. 02).

Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). *Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal*. 14(2), 85–91.

Maryati, M., Wahdi, N. S., & Santoso, A. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1677>

Mentayani, ida, & Rusmanto. (2013). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA DAN KABUPATEN DI PULAU KALIMANTAN. In *Jurnal InFestasi* (Vol. 9, Issue 2).

Mukiwihando, R. (2020). *DAMPAK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT*.

Mundiroh, S. (2019). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH. In *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* (Vol. 2, Issue 1).

Musgrave, R. A. (1971). *Economics of Fiscal Federalism* (Vol. 10, Issue 4). <https://www.jstor.org/stable/40472398>

Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., Widodo, E., & Statistika, J. (2019). *Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015*.

Nasrullah, N., Ibrahim, R., Hakim, L., & Djalil, M. A. (2020). The Effect of Regional Dependence, Regional Independence, Effectiveness of Regional Original Fund (Pad), General Allocation Fund (Dau) and Special Allocation Fund (Dak) on Capital Expenditure at District/City Government of Aceh Province, Indonesia. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 2(5), 89–93. <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2020.v02i05.001>

Nasution, S. A., Valentin, P. M., Sarumaha, A., Manurung, A., & Munawarah, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana

Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Owner*, 7(3), 1841–1852. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1628>

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. In *Journal of Economic Literature: Vol. XXXVII*.

Prabowo, S., & Bawono, I. R. (2023). The Affecting of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund on Capital Expenditures in Central Java. *JURNAL AKUNTANSI*, 18(2), 121–131. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i2.8336>

Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner*, 6(2), 1412–1425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.765>

Purnomo Aji, B., Ketut Kirya, I., & Putu Agus Jana Susila, G. (2019). ANALISIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/bjm.v4i2.22001>

Putra, A. F. S., Irwan, M., & Husnan, L. H. (2021). DETERMINANTS OF CAPITAL EXPENDITURE AND ITS EFFECT ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE: A STUDY ON DISTRICT AND CITY IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE OF INDONESIA. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 110(2), 65–74. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-02.08>

Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 3(2), 85–92.

Rahmadeni, & Nindya Wulandari. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi pada Kota Metropolitan di Indonesia dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika*, 3(2).

Sari, P., Djuanda, G., & Sarwani. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 3, 91–100.

Shinta Qwanthala, Y., Husein, R., & Author, C. (2022). THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS AND FUEL SUBSIDIES ON CAPITAL EXPENDITURES IN INDONESIA. In *Journal of Malikussaleh Public Economics* (Vol. 05).

Sidig, D. S. (2018). *DESENTRALISASI FISKAL DAN KESENJANGAN PENDAPATAN ANTARPROVINSI DI INDONESIA*.

Sukmawati, N., Naryono, E., & Sukabumi, P. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1).

Suryani, N., Jailani, Ms., Suriani, N., Raden Mattaher Jambi, R., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>

Twinki, B. S., & Widiyanti, D. R. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT TAHUN 2019-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489–504. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>